

UNTUK KEMBANGKAN MINAT

24 Peserta Ikuti Pentas Seni Anak

WONOSARI (KR) - Bunda PAUD Gunungkidul Hj Diah Sunaryanta membuka pelaksanaan Pentas Seni Anak di Joglo Taman Budaya Gunungkidul (TBG), Selasa (25/10). Pelaksanaan acara ini diikuti sebanyak 24 penampil atau peserta dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai dari Taman Kanak Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) di Gunungkidul hingga Raudlatul Athfal (RA). "Kegiatan ini penting dalam rangka menumbuhkan minat seni dan budaya siswa sejak usia dini," kata Hj Diah Sunaryanta.



KR-Endar Widodo

Hj Diah Sunaryanta bersama sebagian peserta pentas seni anak.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul Agus Mantara, Himpaudi, IGTKI, IGRA dan undangan. Dalam kesempatan tersebut Hj Diah Sunaryanta memberikan apresiasi atas

pelaksanaan pentas seni anak. Bahkan antusias para peserta cukup besar untuk ikut tampil di TBG. "Mengasah keterampilan kemampuan seni dan budaya, akan lebih baik dilaksanakan sejak kecil," imbuhnya. Pada hari pertama ditampilkan Tari Menthol Menthol TK Negeri Wonosari, Geguritan TK Negeri Purwosari, Cerita Anak TK ABA XI Baran Rongkop, Gerak Lagu Ibu Jari TK

Negeri 1 Maret Playen, Gerak Lagu KB Bina Putra Rongkop dan Dolanan Anak TK ABA Karangmojo XVII. Selain itu juga Tarik Katak TK Negeri Panggang, Tari Batik Walang TK Negeri Ngawen, Tari Jaranan TK Podomoro Wonosari, Tari Gegala RA Masyitoh Ngasinan Gedangsari, Tari Rampak RA Masyitoh Nglaran Gedangsari dan Tari Lir Ilir RA Masyitoh Tengger Ponjong. (Ewi)

LANGGAR HUKUM DAN TAK DISIPLIN

2 ASN Kena Sanksi, 1 Orang Dipecat

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta kembali memberikan sanksi tegas kepada dua Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya mendapatkan sanksi pemberhentian dengan hormat (dipecat).

Kebijakan yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen disiplin agar setiap ASN tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin, kode etik kerja hingga hukum. "Satu ASN kena sanksi penurunan jabatan dan satu lagi pemecatan," katanya, Selasa (25/10).

Para ASN harus bekerja lebih baik karena mereka digaji oleh masyarakat, mereka harus jadi teladan tidak justru memberikan contoh yang baik bukan sebaliknya. Bupati H Sunaryanta tidak merinci alasan pemberian sanksi tersebut.

Ia mengatakan sanksi diberikan karena keduanya sudah melanggar sumpah janji sebagai ASN. Pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas terhadap aparat sipil yang tidak memiliki komitmen disiplin dan pengabdian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Kami berharap kedepan lebih baik dan jangan sampai kasus ini terulang lagi," ujarnya.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan dua

ASN yang dikenai sanksi ini berinisial SN dan GN. Surat sanksi resmi langsung dilayangkan pada keduanya.

SN bertugas di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menerima sanksi karena berceraai namun tidak melaporkannya ke BKPPD.

Sanksi yang diberikan pun tergolong berat. SN dikenai sanksi sesuai Pasal 41 Peraturan Pemerintah (PP) 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia juga dinilai melanggar PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, sebagaimana diubah PP 45/1990. Yang bersangkutan dikenai sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau setahun,"

ucapnya.

Sementara ASN berinisial GN sebelumnya terangkut kasus pidana pemerkosaan dan pencabulan. Ia pun sudah mendapat vonis hukuman kasasi selama 9 tahun penjara dari Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya yang bersangkutan divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wonosari. GN kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke MA, namun ditolak dan vonisnya diperberat menjafi 9 tahun penjara selain itu GN juga divonis 4 tahun penjara untuk kasus pencabulan oleh MA.

"Sanksi pada GN sesuai dengan Pasal 247 PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana diubah dengan PP 17/2020," rerangnya.

(Bmp/Ewi)

IDI Kulonprogo Donor Darah Dukung Rekor MURI



KR-Widiastuti

Pelaksanaan donor darah untuk memecahkan Rekor MURI.

WATES (KR) - Dalam rangka HUT ke-72 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dilaksanakan donor darah serentak nasional oleh IDI Cabang Kulonprogo, di Unit Donor Darah PMI Kulonprogo, Selasa

(25/10). Pelaksanaan donor darah bagi dokter, tenaga kesehatan dan pendukungnya, serta masyarakat umum di Kulonprogo ini diharapkan bisa untuk memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia

Indonesia (MURI).

Diungkapkan Ketua Panitia Donor Darah dr Dian Indah Vitarini MMR, kegiatan donor darah ini serentak disiarkan live streaming untuk memecahkan Rekor Muri seluruh Indonesia. "Nanti kita laporkan yang donor, dari dokter dan non dokter, perwakilan dari seluruh puskesmas, rumah sakit, klinik, TNI dan Polri," ujar Dian sambil menambahkan untuk tema HUT IDI saat ini adalah Berbakti untuk Negeri, Mengabdikan untuk rakyat, Satu IDI Terus Maju.

Dian juga menjelaskan, untuk target kegiatan tersebut semula sekitar 70-an pedomor, namun pada akhirnya tercapai 60. (Wid)

TINGKATKAN PAD GUNUNGKIDUL

Bank BPD DIY Fasilitas Pembayaran PBB

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul memberikan penghargaan kepada 4 kapanewon, 55 kalurahan lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo di Joglo Taman Budaya Gunungkidul (TBG), Senin (24/10). Serta penghargaan kepada pembayar pajak terbesar untuk jenis pajak hotel, restoran, MBLB, reklame, parkir dan hiburan. "Perlu kesadaran dan tekad dalam melakukan pembayaran pajak. Pemkab memberikan apresiasi kepada Panewu dan lurah sehingga jumlah lunas 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021," kata Bupati Gunungkidul H



KR-Dedy EW

Santoso Rohmad menyerahkan kendaraan bermotor kepada bupati.

Sunaryanta. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sri Hartanta mengungkapkan, dalam rangka mening-

katkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Gunungkidul berkerjasama dengan Bank BPD DIY memberikan kemudahan

kepada wajib pajak dengan transaksi digital, melalui mobile banking, ATM BPD DIY dan agen BPD DIY. Pada kesempatan ini Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyerahkan 3 unit kendaraan bermotor layanan pajak daerah yang diterima Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta.

"Harapannya nanti dapat dipergunakan untuk sosialisasi, edukasi, pengecekan pajak dan sebagainya. Sehingga kesadaran masyarakat Gunungkidul dalam pembayaran pajak terus meningkat. Serta meningkatkan PAD," ujarnya.

(Ded)

DINAS KOPERASI DAN UKM

Luncurkan Duta 'TaringKu'

WATES (KR) - Kegiatan pembelajaran duta marketing harus terus dilakukan salah satunya melakukan inovasi dan diusulkan masuk Innovative Government Award 2022. Yakni membranding inovasi Duta Marketing Kulonprogo 'TaringKu'.

"Kami melihat peluang pembelajaran duta marketing bisa berkolaborasi dengan potensi yang belum tergarap secara optimal yakni siswa SMK. Hal itu berkaitan karena kurikulum SMK khususnya Jurusan Pemasaran ada pelajaran marketing," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo, Iffah Mufidati SH saat penandatanganan kerjasama dan launching Logo Duta 'TaringKu' di Aula Adikarto Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, Selasa (25/10).

Program TaringKu sudah diawali 2020 lalu saat terjadi pandemi Covid-19. Ketika itu seluruh kegiatan fisik pertemuan ditiadakan sehingga membuat usaha dan



KR-Asrul Sani

Pj Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana (kiri) menyaksikan Iffah Mufidati SH menandatangani perjanjian kerja sama.

perekonomian para pelaku UMKM di Kulonprogo terpuruk.

Dalam perjalanannya Dinas Koperasi dan UKM menggandeng SMK-SMK di Kulonprogo melaksanakan Program Duta TaringKu. Sebagai pilot project dilakukan kerjasama dengan empat SMK yakni SMKN 1 Pengasih, SMKN 1 Samigaluh, SMK Muhammadiyah 1 Wates dan SMK Taman Siswa Nanggulan.

"Kekuatan potensi generasi muda kami link atau gabungkan untuk pemasaran produk UMKM. Manfaat yang bisa dirasakan

produk UMKM terpasarkan, di sisi lain lebih luas lagi pemberdayaan siswa SMK memberikan kesempatan anak-anak menjadi produk UMKM sebagai laboratorium untuk praktek memasarkan sekaligus memberikan rasa cinta dan bangga mau memakai, mengonsumsi dan memasarkan produk UMKM. Kelak generasi muda akan menjadi wirausaha sukses," jelasnya.

Kerjasama sebagai upaya mendukung serta mengembangkan promosi dan pemasaran produk UMKM secara online. (Rul)

LAKSANAKAN INSTRUKSI KAPOLRI

Polres Maksimalkan ETL E In-Hand

WONOSARI (KR) - Jajaran Satlantas Polres Gunungkidul mulai menindaklanjuti instruksi Kapolri terkait penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan terjun lapangan memberikan edukasi dan teguran lisan kepada pelanggar kasat mata.

Kasatlantas Polres Gunungkidul, AKP Antonius Purwanta menyatakan pihaknya sudah melaksanakan instruksi kapolri tersebut sesuai dengan ketentusan dan arahan. Sebanyak 75 personel kepolisian diterjunkan dan dibekali dengan aplikasi ETL E In-hand di laboratorium untuk praktek memasarkan sekaligus memberikan rasa cinta dan bangga mau memakai, mengonsumsi dan memasarkan produk UMKM. Kelak generasi muda akan menjadi wirausaha sukses," katanya Selasa (25/10).

Para petugas ini akan

berpatroli dan mendata pelanggaran di jalan raya lewat aplikasi tersebut. Pihaknya tidak menampik bahwa saat ini masih ada sejumlah kendala dalam penerapan ETL E In-hand. Salah satunya kondisi di lapangan hingga respon dari para pelanggar sendiri. Saat ini setidaknya ada ratusan pelanggaran yang tercatat lewat ETL E In-hand, tapi pelanggar yang melakukan konfirmasi baru sekitar 50 persen. Pihaknya berharap masyarakat, khususnya pengguna kendaraan untuk berperilaku aktif dan kooperatif dalam penerapan ETL E In-hand ini. Dalam menjalankan tugas tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menindak pelanggaran. Khususnya meningkatkan kesadaran demi mengurangi angka kecelakaan. "Sebab



KR-Bambang Purwanto

Teguran lisan pelanggar lalin dengan pendekatan humanis.

tujuannya demi meningkatkan kesadaran berlalulintas di jalan raya," katanya.

Kapolres Gunungkidul AKBP Edy Bagus Sumantri juga menyatakan akan mengimplementasikan instruksi Kapolri.

Terkait sanksi bagi petu-

gas yang masih menerapkan tilang manual, ia mengatakan perlu ada koordinasi lebih lanjut. "Koordinasi terutama dilakukan dengan Ditlantas Polda DIY terkait penerapan ETL E ini," terangnya.

(Bmp)

SUDAH KUNJUNGI 800 ANGGOTA PARPOL

Tak Ada di Rumah, Dihadirkan di Kantor Parpol

WATES (KR) - Tim Verifikator KPU Kulonprogo melakukan kunjungan ke tempat tinggal 1641 anggota parpol untuk melakukan pengecekan apakah anggota yang didatangi merupakan anggota parpol yang dimaksud atau tidak. Hingga hari ke enam pelaksanaan kunjungan ke tempat tinggal anggota, tim verifikator sudah menyelesaikan kunjungan ke-800-an warga.

"Anggota parpol yang datang akan diberikan status Memenuhi Syarat (MS) jika yang bersangkutan mengakui sebagai anggota dan dapat menunjukkan KTP-El dan KTA (Kartu Tanda Anggota). Jumlah yang dikunjungi 1641 anggota parpol, terdiri Perindo 232, PBB 218, PKN 207, Garuda 225, Hanura 211, PSI 261, dan Partai



KR-Widiastuti

Salah satu anggota parpol yang diverifikasi.

Ummat: 287," ungkap Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kulonprogo Tri Mulatsih MA, Selasa (25/10).

Menurut Tri Mulatsih, Tim Verifikator KPU Kulonprogo yang terdiri dari 14 tim tidak mengunjungi seluruh anggota yang diajukan oleh parpol, akan tetapi kunjungan dilakukan pada

sampling yang sudah ditentukan berdasarkan rumus Krijce and Morgah yang sudah dikirimkan oleh KPU RI ke KPU Kabupaten Kulonprogo.

"Hingga hari keenam pelaksanaan kunjungan ke tempat tinggal anggota, tim verifikator sudah menyelesaikan kunjungan ke-800-an warga. Kegiatan

kunjungan ini akan diselesaikan pada Jumat (28/10) mendatang. Setelah itu tim verifikator akan berkoordinasi dengan parpol untuk menghadirkan anggota yang tidak dapat ditemui di rumah tempat tinggal, untuk dapat dihadirkan di kantor parpol pada waktu yang disepakati antara tim verifikator dan penghubung partai politik," katanya.

Lebih lanjut lagi Tri menyampaikan bahwa menghadirkan anggota yang tidak ditemui ke kantor parpol, merupakan solusi yang diberikan KPU sesuai dengan Peraturan KPU terhadap anggota yang karena keadaan tertentu tidak dapat didatangi di tempat tinggal untuk dapat didatangi di kantor parpol untuk dilakukan verifikasi kembali. (Wid)

Tangani Bencana Alam BPBD Anggarkan Rp 1,1 Miliar

WONOSARI (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul memiliki anggaran Rp1,1 miliar untuk penanganan bencana alam dan dari jumlah tersebut masih bisa bertambah karena ada alokasi anggaran dari belanja tidak terduga sebesar Rp11,6 miliar. Kepala Bidang Pengendalian dan Logistik BPBD Gunungkidul Sumadi mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di awal musim penghujan. Sementara draf penetapan status siaga sudah jadi dan tinggal proses tandatangan bupati.

"Penanganan dan penanggulangan bencana juga didukung dengan anggaran senilai Rp 1,1 miliar dan masih bisa bertambah jika terjadi bencana dengan kerugian yang besar," katanya, Kamis (20/10).

Sesuai ketentuan, pada saat terjadi bencana besar dan membutuhkan upaya

pemulihan, maka BPBD bisa mengakses anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dimiliki Pemkab Gunungkidul.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono menambahkan musim hujan saat ini terbilang panjang dengan intensitas hujan yang lebat. Mengacu pada prakiraan tersebut, BPBD Gunungkidul mewaspadai terjadinya longsor hingga banjir genangan akibat curah hujan tinggi. Dalam pemetaan yang dilakukan tiap tahun untuk bencana longsor berpotensi terjadi zona utara meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin dan satu kapanewon di Ponjong bagian utara, sedangkan banjir di zona selatan.

Sedangkan terkait banjir genangan, ia mengatakan lahan-lahan pertanian berpotensi terdampak. Meski demikian, banjir ini sifatnya hanya sesaat. "Terdapat juga potensi angin kencang yang tingkat kerawatannya merata di seluruh wilayah Gunungkidul," ucapnya. (Bmp)